

No. Dokumen	:	INS-KT-KG-SP-24-022-00
Tanggal Dok.	:	18 Desember 2024

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 70/SK/K/12.2024 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak untuk Pengajuan Status Terakreditasi.



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI
ANAK UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
KEDOKTERAN GIGI ANAK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak ini disusun merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridharma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi prinsip dan pelaksanaan akreditasi yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi Sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program Magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program Doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Akreditasi program studi merupakan bentuk evaluasi pemenuhan standar nasional atau standar yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan hasil **Status Terakreditasi** dan **Status Terakreditasi Unggul**. **Status Terakreditasi** program studi menunjukkan kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi sudah terpenuhi. **Status Terakreditasi Unggul** program studi menunjukkan sudah terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh LAM-PTKes. Evaluasi pemenuhan Standar tersebut dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang dilakukan oleh LAM-PTKes.

Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak ini terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak
Buku II	:	Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak untuk Asesor
Buku III	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak
Buku IV	:	Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi harus mematuhi Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak ini akan bermanfaat sebagai upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak ini.

Jakarta, 18 Desember 2024

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

Ketua,

Ttd.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I. LATAR BELAKANG	5
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	5
1.2 Sejarah Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	10
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK	17
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK.....	18
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	18
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	19
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.....	19
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi.....	20
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	20
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	21
DAFTAR RUJUKAN.....	23

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses, dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi pendidikan merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 47

Ayat (1)

Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dikembangkan perguruan tinggi, sedangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
 1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan
 2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pasal 588

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu.
- (4) Unit penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perguruan tinggi melibatkan perwakilan mitra Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pada RSPPU melibatkan dosen perwakilan perguruan tinggi.
- (5) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi akreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Program sarjana, magister, dan doktor diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- (2) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
- (3) Dst.

Pasal 61

- (1) Program profesi dokter dan dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- (2) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
- (3) Dst.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perguruan Tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.

- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Pasal 76

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
- (5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 78

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.
- (5) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
 - a. program studi; atau
 - b. unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi,untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagai pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.
- (6) Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 82

- (1) Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- (2) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.
- (3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Kesatu : Mengakui Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat dengan nama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Kedua : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan wajib melakukan kegiatan akreditasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi adalah sebagai berikut:

- Kesatu : Memberikan izin kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk melaksanakan akreditasi program studi pendidikan tinggi kesehatan.

1.2 Sejarah Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak

Di Indonesia, ilmu pedodontik mulai berkembang pada era tahun 1960an, yakni sejak berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi. Ilmu pedodontik adalah ilmu kedokteran gigi yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial anak, psikososial anak, dan pengelolaan penyakit dan/atau kelainannya yaitu promotif, preventif, kuratif, bedah, dan rehabilitatif. Pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial dan psikososial anak dimulai sejak di dalam kandungan dan berlangsung secara terus menerus sampai akhir hayat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB I Pasal 1: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ruang lingkup kedokteran gigi anak adalah mengelola penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus sejak di dalam kandungan sampai dengan usia kronologis 18 tahun, perseorangan dan/atau masyarakat.

Pada tahun 1979, berdirilah Ikatan Peminat Pedodontis Indonesia (IPPEDI), yang diprakarsai oleh pakar-pakar ilmu pedodontik dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Padjadjaran, dengan anggota dokter gigi peminat ilmu pedodontik. Salah satu wacana IPPEDI adalah menyelenggarakan pendidikan formal dokter gigi spesialis pedodontis. Manajemen pengelolaan penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial pada anak normal dan anak berkebutuhan khusus merupakan perawatan dengan keahlian spesialis, terintegrasi secara internal dan/atau eksternal, komprehensif, serta holistik, karena anak dalam periode pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial.

Pada tahun 1980, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mengukuhkan dokter gigi pengampu ilmu pedodontik dari departemen pedodontik, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Padjadjaran, yang telah memenuhi *requirement* tertentu, menjadi seorang pedodontis. Kelompok pedodontis merupakan pelopor pendirian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Kedokteran Gigi Anak (PPDGS-KGA). Kemudian IPPEDI berubah menjadi Ikatan Pedodontis Indonesia (IPEDI), beranggotakan para pedodontis.

Pada tahun 1982, departemen Pedodontik FKG UI membuka pendidikan non-gelar atau sertifikasi KGA, dengan lama studi 3-6 bulan, dan beban studi 2-3 sks, dan pendidikan program studi dokter gigi pedodontis dengan lama studi 5 semester, dan beban studi 50 sks. Pada tahun yang sama, hasil keputusan rapat *International Association of Pediatric Dentistry* di Kyoto, Jepang, bahwa istilah pedodontik berubah menjadi *Pediatric Dentistry* dan di Indonesia disebut Kedokteran Gigi Anak. Ilmu pedodontik berubah menjadi Ilmu Kedokteran Gigi Anak (IKGA), demikian pula dengan IPEDI menjadi Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI).

Pada tahun 1984, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi, maka Pendidikan Dokter Gigi Spesialis bidang IKGA merupakan jalur pendidikan PROFESI lanjut. Lama dan beban studi PPDGS-KGA, disesuaikan dengan visi misi masing-masing institusi penyelenggara dan ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), antara 5-6 semester, 50-60 sks.

Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis melalui Surat Keputusan No. 24/KKI/KEP/XI/2006, tahun 2006. Standar tersebut masih bersifat umum, dan merupakan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis. Pada tahun 2007, KKI mengesahkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis yang kemudian diturunkan menjadi Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis KGA Indonesia, dan telah disahkan tahun 2009. Pada awal penyelenggaraan PPDGS-KGA, digunakan seperangkat *Content Based Curriculum*, dengan strategi pembelajaran *Teacher Center Learning* (TCL). Setelah pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis KGA, maka setiap institusi penyelenggara PPDGS-KGA diwajibkan beralih ke *Competency Based Curriculum* (kurikulum berbasis kompetensi) dengan strategi pembelajaran *Student Center Active Learning* (SCAL).

Kurikulum berbasis kompetensi PPDGS-KGA, mengacu pada kurikulum pendidikan tinggi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.045/U/2002, tentang kurikulum inti pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Mengandung 5 (lima) elemen kompetensi:
 - (1) Landasan kepribadian,
 - (2) Penguasaan Ilmu dan ketrampilan,
 - (3) Kemampuan berkarya,
 - (4) Sikap dan perilaku berkarya, serta
 - (5) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.
2. Terdiri dari:
 - (1) Kurikulum Inti (Kompetensi Utama) 40-80%.
 - (2) Kurikulum Institusional:
 - Kompetensi Pendukung 20-40%.
 - Kompetensi Lainnya 0-30%.

Penyelenggaraan PPDGS-KGA adalah pendidikan profesional, yang berlandaskan kompetensi akademik tingkat lanjut. PPDGS-KGA mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan KGA, keterampilan spesialis KGA, dan sikap sebagai dokter gigi spesialis KGA yang profesional. PPDGS-KGA mencakup Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan.

PPDGS-KGA, merupakan kelanjutan dari pendidikan profesi dokter gigi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan profesionalisme yang lebih tinggi dalam mengelola penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial spesialis pada anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus. Menurut PP No. 60 Tahun 1999, kurikulum merupakan dasar penyelenggaraan program studi yang disusun oleh masing-masing pendidikan tinggi. Sedangkan menurut Surat Keputusan Mendiknas No.234/U/2000; program studi adalah rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. Kurikulum PPDGS-KGA meliputi ilmu yang relevan dengan KGA, yakni kedokteran dasar lanjut, ilmu kedokteran klinik, ilmu kedokteran gigi klinik spesialis KGA, dan ilmu sosial-budaya. Keilmuan tersebut mampu membangun kompetensi dalam lingkup 3 domain yang harus dicapai, yaitu: (1). Profesionalisme (15%), (2). Penguasaan akademik tingkat lanjut (35%), dan (3). Keterampilan klinik kedokteran gigi anak spesialis (50%).

Kurikulum Inti PPDGS-KGA, adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme (15%)
 - (1) Bio Etika dan Hukum Kedokteran.
 - (2) Metodologi Penelitian
 - (3) Biostatistik
 - (4) Komunikasi Efektif
 - (5) Evidence-based in Pediatric Dentistry
 - (6) Tesis
2. Akademik Tingkat Lanjut (35%)
 - (1) Logopedi
 - (2) Fisiologi sistem stomatognatik
 - (3) Teori pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial
 - (4) Radiologi dan sefalometri
 - (5) Preventif Ortodontik
 - (6) Interseptif Ortodontik
 - (7) Patologi jaringan lunak dan jaringan keras mulut
 - (8) Traumatik injuri dan child abuse
 - (9) Bedah mulut minor
 - (10) Anak berkebutuhan khusus
 - (11) Anestesiologi
 - (12) Farmakologi
 - (13) Imunologi
 - (14) Biomolekuler
 - (15) Genetika Kedokteran
 - (16) Ilmu Kesehatan Anak

- (17) Psikologi Anak
3. Keterampilan klinik KGA Spesialistis (50%)
- (1) Pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial
 - (2) Pengelolaan patologi jaringan keras dan lunak
 - (3) Anak berkebutuhan khusus

Kompetensi lulusan PPDGS-KGA, minimal memiliki kompetensi sama dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis KGA yang ditetapkan oleh KKI. Lulusan dokter gigi spesialis KGA harus:

- (1) bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan KG spesialis KGA.
- (2) bersikap dan perilaku luhur, dan menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum.
- (3) mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan iptek mutakhir.
- (4) mampu mengembangkan keterampilan dan sikap secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Sasaran pembelajaran PPDGS-KGA merupakan kemampuan dasar yang berasal dari penguraian kompetensi penunjang dari standar kompetensi dokter gigi spesialis KGA. Sedangkan materi pembelajaran PPDGS-KGA disesuaikan dengan tujuan pendidikan/kompetensi lulusan dan strategi pengajaran. Materi pembelajaran KGA disusun dalam bentuk modul terintegrasi antara teori dan praktik, mengacu pada perkembangan iptek KGA mutakhir.

Strategi pembelajaran yang diterapkan pada PPDGS-KGA adalah metode pembelajaran aktif dan fokus pada peserta didik (*student center active learning*). Strategi pembelajaran tersebut antara lain diskusi, *role play and simulation, discovery learning, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, problem based learning, case study and case report, skills lab, scientific session*. Metode pembelajaran ini, akan membantu peserta didik PPDGS-KGA dalam mengembangkan kualitas belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berpikir kritis, dan analisis berdasarkan *evidence based dentistry*. Dalam proses pembelajaran staf pendidik berperan sebagai pembimbing, pendidik, dan penilai. Beban studi dan lama studi PPDGS-KGA, berkisar antara 50-60 sks, dalam waktu 5-6 semester.

Evaluasi PPDGS-KGA, mencakup monitoring proses pendidikan, menilai kemajuan proses pendidikan, dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Metode evaluasi pembelajaran mencakup:

- (1) penilaian dan menentukan kriteria lulusan.
- (2) evaluasi realitas dan validitas metode penilaian.
- (3) nilai *logbook* peserta didik.
- (4) penilaian terstruktur pada tiap tahap pendidikan dengan memperhatikan kemampuan yang harus dicapai sesuai dengan tahapan pendidikan.
- (5) dokumentasi proses dan hasil penilaian dengan baik.
- (6) komponen penilaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.
- (7) ikut sertanya penguji luar (*external examiner*) pada ujian akhir
- (8) metode penilaian yang diupayakan agar berkaitan dengan pelayanan klinik yang dihadapi sehari-hari.
- (9) kriteria hasil penilaian pembelajaran yang harus ditetapkan.

(10) prinsip, metode dan implementasi penilaian sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengembangan proses belajar.

Penyelenggaraan PPDGS-KGA di Indonesia, mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Semua PPDGS-KGA harus memberikan pendidikan minimal seperti tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Mata Kuliah dan Beban SKS Kognitif PPDGS IKGA

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan Materi Pembelajaran	Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran	SKS
1	Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial	Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial	Teori dan teori aplikatif	1
		Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial		
		Diagnosis Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial		
		Genetika dan Biomolekuler pada Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial		
2	Kraniofasial Ortopedik	Biomekanik Perawatan Orthodontik pada Sistem Stomatognati	Teori dan teori aplikatif	1
		Diagnosis dan <i>Treatment Planning</i> Berbagai Macam Masalah Orthodontik pada Anak		
		Preventif dan Interseptif-Korektis Orthodontik pada Anak		
3	Sendi Temporomandibular	Struktur Sendi Temporomandibular	Teori dan teori aplikatif	1
		Biomekanik Pergerakan Rahang		
		Oklusif Statis dan Oklusif Fungsional		
		Gangguan TMJ pada Anak		
4	Patologi Oral Jaringan Keras pada Anak	Struktur Jaringan Keras Gigi	Teori dan teori aplikatif	3
		Kelainan Jaringan Keras Gigi		
		Kariologi		
		Biomolekuler Jaringan Keras Gigi		
		Restorasi Jaringan Keras		
		Endodontik pada Gigi Anak		
		Pencegahan Kelainan Jaringan Keras Gigi		
Trauma Gigi				
5	Patologi Oral Jaringan Lunak pada Anak	Struktur Jaringan Lunak Gigi	Teori dan teori aplikatif	2
		Kelainan Jaringan Lunak Gigi		
		Biomolekuler Jaringan Lunak Gigi		
		Pencegahan Kelainan Jaringan Lunak Gigi		
		Imunologi		
		Patologi Klinik		
6		Rehab Medik		2

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan Materi Pembelajaran	Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran	SKS
	Ilmu Kedokteran Dasar Tahap Lanjut	Radiologi Kedokteran Gigi	Teori dan teori aplikatif	
		Farmakologi Umum		
		Logopedi		
7	Ilmu Kedokteran Klinik Tahap lanjut	Ilmu Kesehatan Anak	Teori dan teori aplikatif	1
		Prinsip Anastesi Umum		
8	<i>Special Care Dentistry</i>	Psikologi anak	Teori dan teori aplikatif	1
		Pelayanan dengan Pendekatan Interdisiplin dan Multidisiplin pada Anak Disabilitas		
		Pendidikan Kesehatan Gigi dan Mulut untuk Anak Disabilitas		
		Manajemen Praktik untuk Anak Disabilitas		
9	Karya Ilmiah Akhir	Filsafat Ilmu	Teori dan teori aplikatif	2
		Metode Penelitian		
		Biostatistik		
		Epidemiologi		
10	Profesionalisme	Komunikasi Efektif	Teori dan teori aplikatif	1
		Etika Hukum Kesehatan		
		<i>Evidence Based Dentistry</i>		
Total				15

Tabel 2. Mata Kuliah dan Beban SKS Psikomotor PPDGS IKGA

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan Materi Pembelajaran	Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran	SKS
1	Terapi Fungsi Otot	Ketidakseimbangan Fungsi Otot	Mengelola terapi	3
		TMJ		
		Kebiasaan Buruk		
2	Pencegahan Maloklusi	Pencegahan Maloklusi Dental	Mengelola pencegahan	2
3	Perawatan Maloklusi	Tatalaksana Maloklusi Tipe Dental	Mengelola perawatan	3
		Tatalaksana Maloklusi Tipe Skeletal dan Deformitas Wajah		
		Tatalaksana <i>Space Management</i>		
4	Perawatan Kelainan Jaringan Keras	Perawatan Pulpa	Mengelola perawatan	3
		Restorasi Adhesive		
		<i>Covering Restoration</i>		
5	Perawatan Kelainan Jaringan Lunak Rongga Mulut	Perawatan Lesi Jaringan Lunak	Mengelola perawatan	2
		Perawatan Jaringan Periodontal		
6	Bedah Mulut Anak	Pencabutan Gigi/Tindakan Bedah Minor	Mengelola perawatan	3
		Perawatan Tumor		
		<i>Anastesi</i>		
7	Kegawatdaruratan Gigi dan Mulut Anak	Penatalaksanaan Trauma Orofasial	Mengelola kegawatdaruratan	2
		Perawatan <i>Child Abuse</i>		
8		Pencegahan Karies Gigi Anak		2

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan Materi Pembelajaran	Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran	SKS
	Pengabdian kepada Masyarakat	Pendidikan Kesehatan Gigi Anak	Mengelola pengabdian masyarakat	
9	Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus/SCN	Tatalaksana Pelayanan Farmakologis Individu Disabilitas Tatalaksana Pelayanan Non Farmakologis Disabilitas	Mengelola anak berkebutuhan khusus	2
10	Interprofesionalisme Kesehatan	Pelayanan dengan Pendekatan Interdisiplin dan Multidisiplin pada Anak	Mengelola pelayanan kesehatan	1
Total				23

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan.

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **laporan evaluasi diri** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi merupakan landasan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses serta hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, sedangkan kode etik akreditasi berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam bab 3.5 Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam delapan kriteria akreditasi sebagai berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Asesmen kinerja program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Laporan evaluasi diri akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/*statute* dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi di atas, dapat dilihat pada Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak akan melakukan akreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang mengajukan proses akreditasinya di LAM-PTKes. Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi LAM-PTKes akan dijelaskan secara lengkap pada Buku IV Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku III. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi mengacu pada Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.

Data, informasi, dan penjelasan yang telah dianalisis dalam bentuk 1 (satu) dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status akreditasi program studi. Laporan Evaluasi Diri program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Laporan Evaluasi Diri program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian Laporan Evaluasi Diri akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 8 (delapan) kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam Laporan Evaluasi Diri, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil Penilaian Akreditasi Program Studi, yaitu

1. Status Terakreditasi

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi apabila sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

2. Status Tidak Terakreditasi

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Tidak Terakreditasi** apabila program studi **tidak memenuhi atau berada di bawah Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak. LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota serta staf LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AFDOKGI (Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia) adalah organisasi yang mewadahi perguruan tinggi kedokteran gigi di Indonesia. Mereka bertujuan untuk memajukan pendidikan kedokteran gigi, penelitian, dan pelayanan masyarakat di bidang kedokteran gigi. AFDOKGI merupakan satu-satunya perkumpulan Institusi Pendidikan Dokter Gigi di Indonesia yang berupaya untuk (1) menggalang, meningkatkan dan membina kerjasama tridharma antar institusi pendidikan dokter gigi di Indonesia; (2) mendorong, membina, mengembangkan dan memfasilitasi program pendidikan dokter gigi yang bermutu tinggi, (3) mengembangkan Ipteksdokgi yang berkualitas, kompetitif dan bertaraf internasional; (4) berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan tentang pendidikan dokter gigi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut (*policy development*); serta (5) bekerjasama dengan lembaga lain (*stakeholders*) yang terkait dengan pendidikan dokter gigi baik di dalam maupun luar negeri.

Akreditasi adalah penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu program studi pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi pendidikan.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi pendidikan atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi pendidikan yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Asesor adalah pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM-PTKes dalam suatu tim untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar/kriteria akreditasi suatu program studi.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Pendukung Akreditasi, merupakan dokumen lampiran yang berisikan data dan informasi untuk melengkapi laporan evaluasi diri suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Elemen Utama adalah komponen kritis yang digunakan untuk menilai dan memastikan mutu institusi atau program studi.

Kriteria Akreditasi merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu program studi pendidikan.

Kriteria Akreditasi LAM-PTKes adalah tolok ukur komponen akreditasi yang lebih tinggi tingkatannya dari SN-Dikti dan cakupan kriterianya lebih luas dari SN-Dikti.

LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri penjaminan mutu eksternal program studi yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dibidang pendidikan kesehatan.

Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah laporan mengenai proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi pendidikan untuk merealisasi visi institusi atau program studi pendidikan tersebut.

PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para dokter gigi di Indonesia.

Pemenuhan Terhadap Elemen Utama adalah konsistensi implementasi institusi atau program studi dalam memenuhi **Elemen Utama** sebagai bagian dari **Subkriteria** pada masing-masing **Kriteria** yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak adalah program pendidikan lanjutan yang dirancang untuk mendidik dokter gigi menjadi spesialis dalam bidang kedokteran gigi anak. Program ini bertujuan untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kompetensi dalam mendiagnosis, merencanakan, dan memberikan perawatan gigi kepada anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau kondisi medis tertentu.

Status Terakreditasi memiliki makna program studi sudah memenuhi SN-Dikti.

Status Terakreditasi Unggul memiliki makna program studi sudah memenuhi standar LAM-PTKes.

Status Tidak Terakreditasi memiliki makna Program Studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN-Dikti

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- VcCHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.* <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b>(diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 Tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk melaksanakan akreditasi.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme, Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi.

QAAHE External review process – Proposal. <http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55).

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.